

**“Penerapan Sistem Muzara’ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale
Kabupaten Bulukumba”**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Ekonomi Islam (S.EI) Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

Dahrum

Nim :10200110020

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum wr.wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan Hidayahnya-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan Taslim semoga senantiasa tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kejahiliyan menuju alam kedamaian.

Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini, penulis menyadari bahwa literature dan data yang disajikan masih minim jumlahnya, karena keterbatasan dana dan waktu. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan koreksi, saran, dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca.

Penyusun Skripsi ini terselesaikan berkat adanya kerjasama, bantuan, arahan, bimbingan dan petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, sehingga patut kiranya penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda Kahar dan Ibunda Syamsia, serta buat saudara(i) saya Adinda Astuti dan Adinda Tio yang telah banyak membantu baik berupa dukungan materiil maupun moril, dan doa yang senantiasa menyertai

penyusun sehingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan ini dengan baik.

2. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para pembantu Rektor serta seluruh jajarannya yang senantiasa mencurahkan dedikasinya dengan penuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Muslimin Kara., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi pengarahan dan pembimbing kepada penulis hingga selesainya Skripsi ini.
4. Bapak Drs. Thamrin Logawali., M.H selaku pembimbing II yang telah memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis hingga selesai skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
6. Ibu Rahmawati Muin.,S.Ag.,M.Ag dan Drs. Thamrin Logawali, M.H selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala kontribusi, bantuan dan bimbingannya selama ini.

7. Bapak Akrammuannas., S.E.,M.Si selaku dosen pengajar yang telah banyak memberikan inspirasi dan motivasi secara tak kasat mata kepada penulis hingga penulis tertarik mengambil judul dan dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.
8. Seluruh tenaga Dosen Khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan dengan ikhlas mengamalkan ilmunya kepada penulis.
9. Terimah kasi kepada saudara-saudara seataap Kakanda Fajar., SE Kakanda Akbar Abadi., SH, Kanda Edo., S.T, Ochie., S.Ei dan Hasri S.Ei yang telah banyak berbagi dan memberikan support sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini sebagaimana mestinya.
10. Rekan-rekan dan saudara seperjuangan Ekonomi Islam angkatan 2010 yang tak dapatkan disebutkan satu persatu. Terima kasih atas setiap dukungan, inspirasi, motivasi dan momen-momen yang berkesan yang telah kalian berikan.
11. Teman KKN Profesi Angkatan V UIN Alauddin, Desa Bonto Manai, Dusun Camba, Kabupaten Gowa yang telah memberikan semangat, mengajarkan arti kedewasaan, tanggung jawab serta saran-saran yang bermanfaat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Terimah Kasih Kepada semua wanita yang pernah menolak penulis, sehingga penulis termotivasi untuk menjadi pria yang lebih baik lagi.

Akhirnya kepada Allah jugalah, penulis memohon doa dan Rahmat-Nya, semoga amal bakti yang telah disumbangkan kepada penulis mendapatkan pahala dan berkah disisi-Nya agar kiranya dengan penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat, Khususnya bagi yang telah membaca isi skripsi ini.

Tak lupa penulis mengucapkan kata maaf yang sebesar-besarnya. Karena menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tak luput dari kesalahan, baik dari redaksi kata-kata mau pun yang lainnya yang tidak berkenaan dihati. Sesungguhnya kebenaran mutlak hanya milik Allah SWT dan manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Illahi Rabbi.

Amin Yaa Rabbil Alamin.

Makassar, 3 Maret 2016
Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
DAHRUM
10200110020
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Defenisi Operasional	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Muzara'ah	8
1. Pengertian Muzara'ah	8
2. Diisyaratkannya Muzara'ah	10
3. Transaksi Muzara'ah	10
4. Perbedaan Muzara'ah, Musaqah dan Mukharabah	11
5. Rukun Muzara'ah	12
6. Syarat-syarat Muzara'ah	12
7. Dalil dan Hukum Muzara'ah	14
8. Dasar-dasar Muzara'ah menurut Para Ulama	17
9. Kewajiban Pemilik dan Pekerja	20
10. Perbedaan Bagian dan Kerusakan	21
11. Menyewakan Tanah	22
12. Zakat Muzara'ah	23
13. Berakhirnya Muzara'ah	23
14. Hikmah Muzara'ah	24
B. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan	26
1. Pengertian Kesejahteraan	26
2. Prinsip Kesejahteraan	28
3. Konsep Kesejahteraan	29
4. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	30

C. Kajian Pustaka	34
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Instrumen Penelitian	40
F. Analisis Data	41
G. Pengujian Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba	45
1. Latar Belakang Kelurahan Palampang	45
2. Letak Geografis	46
3. Keadaan Demografis	47
4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	48
B. Penerapan Sistem <i>Muzara'ah</i> yang terjadi di Kelurahan Palampang Kec. Rilau Kab. Bulukumba	49
1. Sistem Perjanjian Akad <i>Muzara'ah</i>	50
2. Pendapat narasumber di wilayah objek penelitian	52
3. Waktu berakhirnya akad <i>muzara'ah</i>	53
4. Sistem bagi hasil pada akad <i>muzara'ah</i> bagi petani di kelurahan Palampang	53
C. Penerapan Sistem <i>Muzara'ah</i> Dari Perspektif Ekonomi Islam Yang Terjadi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba	59
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

ABSTRAK

Nama : Dahrum
Nim : 10200110020
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Islam
Judul : Penerapan Sistem *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba

Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penerapan sistem *muzara'ah* dalam pandangan ekonomi Islam di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Yang bertujuan untuk mengetahui tentang praktek *muzara'ah* yang berlaku di masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale.

Penelitian yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan instrument penelitian terdiri atas interview dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *muzara'ah* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *muzara'ah* dan pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Walau pun dalam ekonomi Islam belum dijelaskan secara spesifik mengenai hukum bagi hasil dengan istilah '*Urf*, yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadits serta tidak mengandung mudharat.

Penulis menyarankan agar tata cara dalam akad *muzara'ah* hendaknya disesuaikan dengan perkembangan zaman yaitu perjanjian akadnya hendaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis agar tidak kesalah pahaman atau yang adanya pihak yang dirugikan antara pemilik lahan dan petani (penggarap).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah merupakan makhluk sosial yang di ciptakan oleh Allah SWT, dalam hidup manusia memerlukan orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dimana dalam bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat melangsungkan kehidupan, maka Allah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah di tentukan atau yang digariskan oleh agama.

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak manusiawi, tidak religius dan melanggar norma-norma moral.

Manusia dituntut untuk bekerja sama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap individu mempunyai kemampuan fisik dan mental yang berbeda-beda, maka dari itu dibutuhkan kerja sama untuk menutupi kekurangan yang mereka miliki. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk membantu satu sama lain agar mereka menyadari bahwa di dunia ini tidak yang sempurna melainkan Allah SWT.

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluru meliputi: (a) Bidang aqidah, yaitu pedoman-pedoman tentang seharusnya kepercayaan atau keyakinan. (b) Bidang akhlak, pedoman tentang seharusnya manusia bersikap baik dalam berhubungan dengan Allah SWT, sesama manusia maupun alam sekitarnya. (c) Pedoman hidup tentang ibadah yaitu bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, bergaul antar bangsa dan sebagainya¹.

Islam mengandung kaidah untuk saling menyayangi di antara manusia, membangun masyarakat dengan dasar *ta'awun* (tolong menolong), *mawaddah* (menyayangi), dan *ikha* (persaudaraan). Dalam harta seseorang yang kaya, terdapat hak orang-orang yang membutuhkan, sebuah hak bukanlah sedekah, anugerah ataupun pemberian. *Muzara'ah* merupakan salah satu pilihan untuk membangun suatu kerja sama untuk membangun suatu kerja sama dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Di dalam *Muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.

Kerja sama dalam bentuk *Muzara'ah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehan itu disamping dapat dipahami

¹Ahmad Azhar Basyir, *garis-garis besar ekonomi islam*, (edisi revisi, Yogyakarta BPFE, 1978)

dari firman Allah yang menyuruh untuk saling tolong-menolong, juga secara khusus hadits Nabi.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
(رواه مسلم)

Artinya :

“Dari Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)”. (H.R Muslim)²

Hadits diatas salah satu hadits yang digunakan oleh mayoritas ahli hukum Islam sebagai argumentasi untuk mendukung pembagian hasil panen adalah halal didasarkan argumentasi bahwa Rasulullah hanya melarang dimana ada satu pihak yang merasa dirugikan.

Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi berkata: Diantara hukum-hukum *muzara'ah* adalah sebagai berikut: (1) Masa *Muzara'ah* harus ditentukan misalnya satu tahun. (2) Bagian yang di sepakati dari ukurannya harus diketahui dan harus mencakup apa saja yang dihasilkan tanah tersebut. Jika pemilik tanah berkata kepada penggarapnya: ”Engkau berhak atas apa yang tumbuh di tempat ini dan tidak di tempat yang lainnya.” Maka hal ini tidak sah. (3) Jika pemilik tanah mensyaratkan mengambil bibit sebelum dibagi hasilnya kemudian, sisanya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap tanah sesuai dengan syarat pembagiannya, maka *muzara'ah* tidak sah. Seorang

² Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 693

muslim yang memiliki kelebihan tanah, disunnahkan memberikan kepada saudaranya tanpa kompensasi apapun, karena Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرَّ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَزِرَّ عَلَيْهَا فَلْيُزِرَّ عَلَيْهَا أَخَاهُ

Artinya :

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.”³
(Hadits Riwayat Bukhari)

Hadits diatas menganjurkan untuk bekerja sama bila pemilik lahan tidak mampu menggarapa lahan miliknya, hendaklah ia memberikan lahannya kepad orang lain untuk dikelola dan membuat sebuah perjanjian agar tidak ada yang merasa dirugikan akan tetapi membagi keuntungan atas hasil panen yang dihasilkan setiap waktunya.

Penggarapan tanah tidak boleh adanya unsur-unsur yang tidak jelas, seperti pemilik tanah mendapat bagian tanaman bagian dari tanah sebelah sini, dan sipenggarap mendapatkan tanaman di tanah sebelah sana. Hal ini dikatakan tidak jelas karena hasilnya belum ada, bias jadi bagian tanaman dari sebelah sini yaitu pemilik lahan bagus dan bagian sebelah sana gagal panen ataupun sebaliknya. Dan bila keadaan ini terjadi maka ada satu pihak yang dirugikan. Pada hal muzara'ah termasuk dari kerja sama yang harus menanggung keuntungan maupun kerugian bersama-sama.

³ Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Fathul Baari (Kitab Shahih al-Bukhari)* , (Jakarta: Buku Islam Rahmatan Cet 2, 2010), h. 302

Penjelasan diatas tampaknya jelas bahwa praktek muzara'ah harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun lisan, dan pelaksanaan pun harus sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah lakukan pada masa itu. Oleh karena disini penulis mengambil permasalahan yang sama tentang bagi hasil, namun penulis ingin menganalisa dari sisi masyarakat di Kelurahan Palampang melakukan perjanjian sawah dengan cara investasi (benih) bersama.

Para petani di kelurahan palampang penggarapan sawah dalam melakukan penggarapan sawah hal bibit, pupuk dan lain-lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah tidak hanya berasal dari pemilik sawah saja, tapi juga dari pihak penggarap, sehingga petani memberikan bibit dan pupuk dalam satu lahan yang digarap oleh petani penggarap. Sedang biaya-biaya penggarapan sawah ditanggung oleh pemilik lahan. Dalam perjanjian dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan dan prosedur hokum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerja sama kedua belah pihak. Dengan tidak bukti yang kuat tersebut. Terjadi kesenjangan antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam hal keuntungan. Kadang petani penggarap

merasa dirugikan karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan kerja keras mereka selama proses penanaman hingga panen tiba.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Penerapan Sistem *Muzara’ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah ini adalah, “Bagaimanakah penerapan sistem *muzara’ah* dalam pandangan ekonomi islam di Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba”.

C. Defenisi operasional

Untuk menghindari kesalahan penafsiran maka perlu ditegaskan bebarapa term yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. *Muzara’ah* adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan

pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (dari hasil panen).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain yaitu untuk mengetahui tentang praktek sistem muzara'ah yang berlaku di masyarakat Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat/sarana untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Sebagai bahan rujukan bagi alumnus jurusan ekonomi Islam dan/atau untuk peneliti lain yang berminat mengkaji topik yang sama, yang nantinya akan konsen pada penelitian dengan judul skripsi ini.
3. Sebagai sumbangsih keilmuan untuk para pembaca pada umumnya, dan pribadi penulis khususnya, sebagai litelatur tambahan tentang Implementasi *Muzara'ah* di masyarakat, serta sebagai pengetahuan tambahan yang dapat memberikan hasanah yang bermanfaat dalam kehidupan.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Muzara'ah

1. Pengertian Muzara'ah

Pengertian *muzara'ah* menurut bahasa, *al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-Muzara'ah* yang berarti *Tharhal-Zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal yang pertama adalah makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Secara etimologis berasal dari kata *al-Zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan.

Adapun *muzara'ah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁴

Al-Muzara'ah seringkali diidentikkan dengan *Mukharabah*. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut.

Muzara'ah : benih dari pemilik lahan

Mukharabah : benih dari penggarap⁵

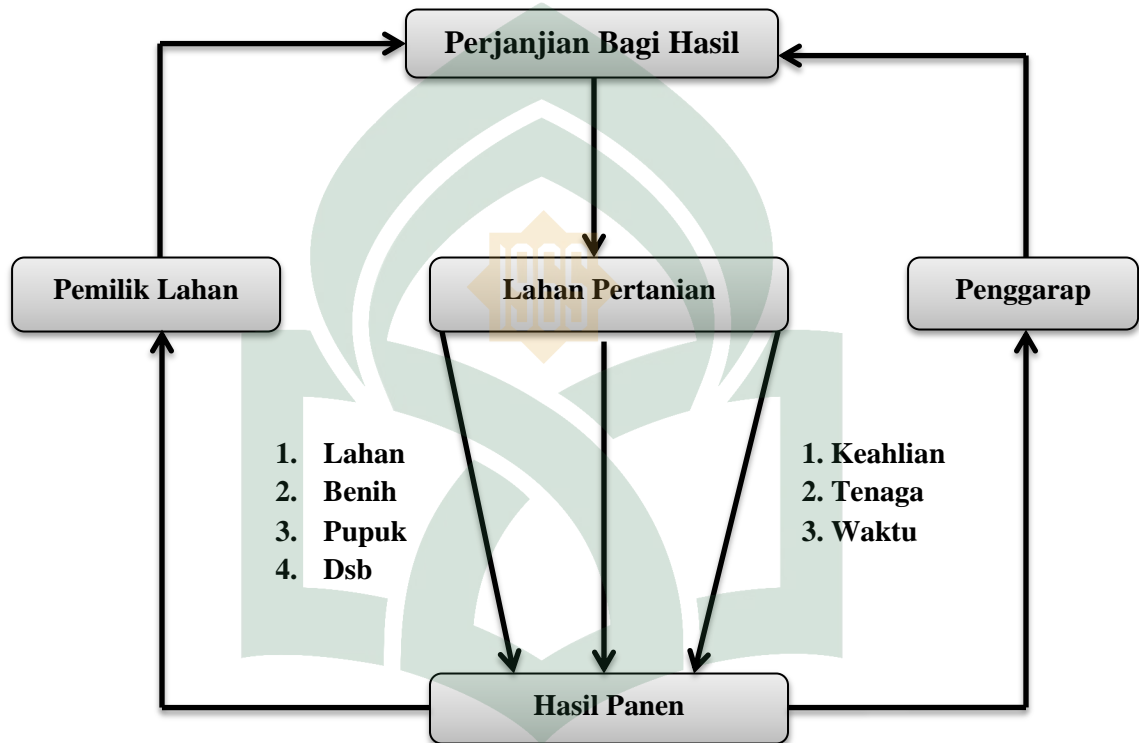
⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 204

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqhu al-islami wa Adililatuhu* (Damascus: Darul-Fikr, 1997), cetakan ke-4, vol. VI, h. 468.

Secara umum, *muzara'ah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut.⁶

Gambar 2.1

Skema Muzara'ah



Sumber: Muhammad Syafi'I Antoni, Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum

Penjelasan dari skema diatas adalah sebagai berikut:

Perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan petani penggarap atas sebuah lahan pertanian, dimana pihak pertama (pemilik lahan) menyediakan lahan, benih, dan

⁶ Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum* (Cet. I : Jakarta : Dar Al ittiba', 1999), h. 141.

pupuk untuk selanjutnya serahkan oleh pengelolannya kepada pihak kedua (petani penggarap) untuk digarap dengan keahliannya, waktu dan tenaga yang dimilikinya oleh petani penggarap, dengan persentase pembagian hasil dari lahan tersebut pada waktu panen sesuai dengan kesepakatan keduanya.

2. Diisyaratkannya Muzara'ah

Muzara'ah adalah *masyru'* (diisyaratkan) berdasarkan ijma', Ulama' dan nash.⁷ Diantarnya ucapan Imam Ja'far al-Shadiq, "*muzara'ah* dapat dilakukan dengan sepertiga, seperempat, seperlima dan seterusnya". Juga ucapan beliau, "ketika menaklukkan Khaibar, Rasulullah saw menyerahkan (yakni pengelolaan tanah perkebunan Khaibar) kepada mereka dengan (pembagian hasil) separoh". Penulis Al-Jawahir berkata, tidak ada keraguan dalam hal *masyru'*nya *muzara'ah* dikalangan ulama'. Nash-nash tentang *muzara'ah* dan *musaqah* mencapai tingkat *mustafidh* atau *mutawatir*.⁸

3. Transaksi Muzara'ah

Mayoritas fuqoha' dari kalangan malikiyyah, syafi'iyyah, sebagian sahabat-sahabat ahmad dan lain sebagainya berpendapat bahwa transaksi *muzara'ah* adalah transaksi yang mengikat karena merupakan transaksi tukar-menukar.

Ada dua pendapat dari kalangan fuqaha', diantaranya Imam Ahmad dan sebagian berpendapat golongan syafi'iyyah, menyatakan bahwa transaksi *muzara'ah* boleh (tidak mengikat) karena Rasulullah saw tidak memberi batasan waktu kepada penduduk Khaibar. Demikian pula yang dilakukan para Khalifah sepeninggal beliau.

⁷ Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (cet I; Jogjakarta: Kencana, 2011), h. 102

⁸ Jawad, Mughniyah Agus, *Fiqh Imam Ja'far As-Shadiq* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), h. 588.

Keduanya merupakan transaksi atas sebagian pengembangan harta, maka hukumnya boleh (tidak mengikat) seperti halnya mudharabah. Oleh karena itu masing-masing dapat membatalkan transaksi kapanpun. Dalam artian mereka membuat hukum pembatalan transaksi sebelum, berakhirnya masa yang disepakati. Jika transaksi dikeluarkan setelah keluar buahnya maka, maka hasilnya dibagi dua. Jika pekerjaan membatalkan transaksi sebelum keluar buahnya, maka ia tidak mendapat apa-apa. Jika pemilik tanah membatalkan, ia harus memberi upah kerja kepada pekerja.

Penjelasan diatas, kesimpulannya adalah satu, yaitu tujuan utama yang berpendapat bahwa transaksi *muzara'ah* bersifat mengikat adalah untuk menghindari kesulitan dan kerugian kedua belah pihak. Sementara itu, ulama' yang berpendapat bahwa boleh (tidak mengikat) juga membolehkan pembatasan waktu tertentu. Oleh karena itu, pendapat pertama lebih baik karena dapat merealisasikan tujuan dan kerelaan kedua belah pihak, dan dengan cara membatasi waktu tertentu, maka tujuan transaksi *muzara'ah* dapat tercapai.⁹

4. Perbedaan musaqah, muzara'ah dan mukharabah.

Muzara'ah sering kali diidentikan dengan musaqah dan mukharabah akan tetapi diantaranya ada sedikit perbedaan sebagai berikut:

- a. Musaqah merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau tanamana dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebut dalam akad.

⁹Muhammad Abdullah al-Thayyar, Th. I dan dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan empat Mahzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanafi, 2009), h. 304-305.

- b. Sedangkan *muzara'ah* dan *mukhabarah* mempunyai pengertian yang sama, yaitu merupakan kerja sama antara pemilik lahan atau tanah dengan petani penggarap, namun yang di persoalkan disini hanyalah bibit pertanian itu. *Muzara'ah* bibitnya berasal dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* bibitnya dari petani atau penggarap.

5. Rukun muzara'ah

- a. Aqidain (dua orang yang bertransaksi) yaitu pemilik lahan dan pekerja atau petani penggarap (muzari').
- b. Objek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam *muzara'ah*, meliputi tanaman pertanian, hasil pertanian, dan bagian masing-masing.
- c. Shighah. *Muzara'ah* dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan arti yang dimaksud akad.¹⁰

6. Syarat-syarat muzara'ah

Adapun syarat-syarat *muzara'ah*, menurut jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: Keduanya harus baliq dan berakal.
- b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
- c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut :

¹⁰ Muhammad Abdullah al-Thayyar, Th. I dan dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan empat Mahzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanafi, 2009), h. 299.

1. Menurut adat dikalangan para petani tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.
 2. Batas-batas tanah itu jelas.
 3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap, apabila diisyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian maka akad *muzara'ah* tidak sah.
- d. Syarat-syarat yang menyangkut hasil dengan panen sebagai berikut:
1. Pembagian hasil panen terhadap masing-masing pihak harus jelas.
 2. Hasil panen tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
 3. Pembagian hasil panen itu ditentukan : setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu dapat juga jauh melampui jumlah itu.
- e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad ijarah (sewah-menyewah dan upah-mengupah) dengan imbalan sebagai hasil panen. Oleh sebab itu jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuannya jangka waktu itu biasanya disesuaikan dengan adat setempat.
- f. Syarat yang menyangkut kehalalan barang atau objek muzara'ah itu sendiri. Dalam hal ini kedua belah pihak yaitu pemilik lahan ataupun penggarap haruslah memperhatikan dengan jelas halal atau tidaknya objek yang mereka harus olah, agar usaha tersebut sejalan dengan ajaran agama islam.

Jumhur ulama yang membolehkan *al-muzara'ah*, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari dari petani.

7. Dalil dan Hukum muzara'ah

Dalam QS al-Maidah/5:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹¹

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya menepati suatu perjanjian sesuai yang telah disepakati bersama demi memelihara untuk menjaga saling kepercayaan satu sama lain.

Ayat ini mencakup sekian banyak ayat yang mengandung uraian tentang akad, baik secara tegas maupun tersirat. Kata *auwfu*, sebagaimana pada ayat diatas mulanya berarti memberikan sesuatu dengan sempurna, dalam arti melebihi kadar yang seharusnya. Sedangkan kata *al-u'qud* adalah jama' dari akad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan berpisah dengannya. Perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dengan segala bentuk dan

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahnya*. (Semarang; CV. Alwaah, 1989), h. 106.

maknanya dengan pemenuhan sempurna. Kalau perlu melebihi dari yang seharusnya, serta mengecam mereka yang menyia-nyiakannya.

Sedemikian tegas Al-Qur'an dalam kewajibannya memenuhi akad hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan atas kepentingan perorangan.¹² Dalam QS Al-Israa'/17: 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahannya:

dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.¹³

Dari penjelasan ayat diatas adalah setiap setiap perjanjian harus pertanggung jawabannya yaitu wajib menepatinya, agar tidak adapihak yang dirugikan. Dalam al- hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim dari Abu Abbas ra. menyatakan

¹² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001), h. 6-7.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Alwaah, 1989), h. 285.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ قَرْبَمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ
فَنَهَاتَاعَنَّ ذَلِكَ

Artinya :

“Berkata Rafi’ bin Khadji: “banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah Saw. Melarang paroon dengan cara demikian (HR. Bukhari)¹⁴

Hadits diatas menjelaskan tentang boleh atau tidaknya melakukan muuzara’ah karena memang kejadian kejadian dimasa dahulu, mereka memarohkan tanah dengan syarat dia akan mengambil penghasilan dari tanah yang subur inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, karena akan merugikan salah satu pihak.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
(رواه مسلم)

Artinya :

Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)”. (H.R Muslim)¹⁵

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan *Muzara’ah* (kerja sama dibidang pertanian) yang hasilnya dibagi setiap panennya sesuai kesepakatan awal.

¹⁴ Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 691.

¹⁵ Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 10

Muzara'ah adalah sesuatu yang diisyaratkan. *Muzara'ah* termasuk bentuk tolong menolong secara koperatif antara pekerja/penggarap dan pemilik tanah . hal ini karena kadang-kadang orang yang memiliki tanah tidak mampu menggarapnya sendiri karena lemah, area tanah luas, atau banyaknya tanaman. Dipihak laian pekerja/penggarap mampu mengerjakannya dengan tenaga dan pengalaman. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi. Islam mengsyariatkan hal itu karena bermanfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat.

8. Dasar- dasar *Muzara'ah* menurut para ulama'

Dasar diisyaratkan *muzara'ah* adalah Hadits Rasulullah saw. Ada beberapa Hadits shahih mengenai hal ini, diantaranya adalah Hadits dari Abdullah Ibnu Umar *Radhiyallahu 'anhu*, ia berkata :

مِنْ مِّنْهَا يَخْرُجُ مَا بِشَطْرِ خَيْبَرَ عَامِلَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ أَنَّ اللَّهَ عَبْدٌ عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنِي اللَّ عُبَيْدٌ عَنْ
يَحْيَى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا زُرْعٌ أَوْ ثَمَرَةَ

Artinya :

“Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam mempekerjakan penduduk khaibar dengan upah separoh hasil yang keluar darinya, yakni berupa buah atau tanaman. (Hadits riwayat Imam Bukhari, Abu Daud dan An- Nasai)¹⁶

Dari Hadits diatas menjelaskan bahwa rasulullah saw pernah mempekerjakan penduduk khaibar dengan upah separuh hasil yang keluar darinya. Kemudian pembagiannya seper tiga (1/3) atau seper empat (1/4).

¹⁶ Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 10

Abu Hanifah tidak sepakat dengan pendapat diatas. Ia menolak *muzara'ah* berdasarkan argumentasinya sendiri. Adapun Imam Malik berpendapat diisyaratkannya *muzara'ah* berdasarkan hadits-hadits Rasulullah saw jika tanah dalam *muzara'ah* didominasi kurma, yakni kurma lebih banyak dari tanaman lainnya, seperti jika tanaman lain mencapai sepertiga kurma atau lebih sedikit lagi.

Imam Syafi'I berpendapat bahwa *muzara'ah* tidak diisyaratkan berdasarkan Hadits yang bersumber dari Rafi' Ibnu Khadij. Namun, sebagian pembesar ulama' syafi'iyah, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Mundzir, dan Al-Khathabi memperbolehkannya. Mereka menyatakan bahwa dibolehkan dan telah dipraktekkan oleh kaum muslimin diberbagai negeri dan tidak seorang pun yang membatalkannya.

Pendapat yang rajah (*valid*) adalah diisyaratkan *muzara'ah* berdasarkan Hadits-hadits shahih yang menjelaskan persyariatannya yang telah mencapai status ijma. Adapun Hadits Rafi' Ibnu Khadij *Radhiallahu 'anhu* bahwa Rasulullah saw melarang *muzara'ah* telah ditolak oleh Zaid Ibnu Tsabit *Radhiallahu 'anhu* juga menolak Hadist Rafi' Ibnu Khadij, ia berkata : “sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, tidak mengharamkan *muzara'ah*, tetapi memerintahkn agar manusia mempunyai rasa kasih sayang satu sama lain dengan sabdanya :

أَخَاهُ فَلْيَزْرَعْهَا يَزْرَعْهَا لَمْ فَإِنْ فَلْيَزْرَعْهَا أَرْضَ لَهُ كَانَتْ مَنْ

Artinya :

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari)¹⁷

Dari Hadits diatas menjelaskan bahwa: apabila seseorang mempunyai tanah yang luas maka sebaiknya berikan kepada seseorang untuk menggarapnya dengan imbalan setiap panen si penggarap berhak mendapatkan separoh hasil pertanian atas apa yang ia kerjakan.

Ibnu Thaimiyyah berpendapat bahwa maksud Rasulullah saw melarang kerja sama menyewakan tanah dalam arti umum adalah jika pemilik tanah mensyaratkan ia sendiri yang membiayai keseluruhannya (karena maksud ijarah pada sesuatu yang belum ada). Islam memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk melakukan transaksi muzara'ah. Salah satu terdapat dalam riwayat Anas *Radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah saw bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَ مَا سَرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَ مَا أَكَلَتْ لَطِيْرٌ وَفَهُ لَهُ أَصَدَقَةٌ وَ لَا يَزْرُوهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya :

“Tidak ada seorang pun muslim yang menanam tanaman atau menanam pohon kemudia dimakan burung, manusia, atau ternak melainkan itu merupakan shadaqah baginya.”¹⁸

¹⁷ Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 302

¹⁸ Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 7

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa seseorang dilarang melakukan suatu kerja tanpa sebuah akad antara pemilik tanah dan penggarap. Hal ini bermaksud agar tidak satu pun pihak yang dirugikan atas kerjasama tersebut.

9. Kewajiban pemilik dan pekerja

Pekerja wajib mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan untuk kebaikan buah dan peningkatan produksi setiap tahunnya, seperti menyirami, mengola lahan, menjaga dan sebagainya.

Adapun pemilik tanah atau lahan berkewajiban mengerjakan sesuatu untuk kebaikan tanaman, membuat pagar, membuat saluran pengairan dari dan lain sebagainya.

Sebagian fuqoha' menyatakan yang juga menjadi pendapat hanabialah, bahwa benih menjadi tanggung jawab pemilik tanah karena keduanya berserikat untuk mengembangkannya, maka modal harus dari salah satu pihak, seperti al-mudharabah. Ulama' lain berpendapat tidak diisyaratkan demikian. Boleh saja pekerja yang memberikan benihnya. Demikian ini pendapat 'Umar, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim. Mereka berargumentasi bahwa dasar *muzara'ah* adalah tanah Khaibar, sedangkan Rasulullah saw tidak menyebutkan bahwa benihnya menjadi tanggung jawab kaum muslimin.

10. Perbedaan bagian dan kerusakan

Jika kedua belah pihak berselisih mengenai bagian pekerja, pendapat yang dapat dipegang adalah ucapan pekerja jika menuntut sesuatu yang layak baginya karena mempunyai posisi yang kuat dalam melaksanakan *muzara'ah*. Imam As-Syafi'i menyatakan kedua harus bersumpah. Adapun Hanabilah berpendapat bahwa yang dipegang ucapan adalah pemilik tanah karena ia yang mengingkari. Hal ini berdasarkan Hadits :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
عَوَاهُمْ لَادَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى لُمدَّ عِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”¹⁹

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa setiap perjanjian harus dipenuhi dan bertanggung jawabkan, apabila ada salah satu pihak yang mengingkari perjanjian tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan.

Jika pekerja mengklaim bahwa garapannya rusak, klaimnya itu dapat diterima karena ia orang yang dipercaya. Posisi sama seperti dengan pelaksana dalam bagi hasil. Jika ia di mengklaim, ia bersumpah, dan jika terbukti khianatnya,

¹⁹ Muhammad Nashiruddi Al bani, *al-jami' al-Shagir, Juz I*, penerjemah: Imran Rosadi dan Andi Arlin (Jakarta: Najla Press, 2004), h. 494.

harus dicarikan orang lain yang menyertainya. Jika tidak mungkin menjaganya, pemilik tanah boleh mempekerjakan orang lain untuk menggantikannya. Demikian ini pendapat Imam Syafi’I. sementara itu , para sahabat Malik berpendapat orang lain tidak boleh menggantikan pekerjaannya, tetapi menjaganya.²⁰

11. Menyewakan tanah

Boleh menyewakan tanah dengan pembayaran uang atau barang. Imam Ahmad menyatakan bahwa Ulama’ berbeda pendapat mengenai emas dan perak. Ibnu al-Mundzir berkata, “pada umumnya, ulama sepakat dibolehkannya menyewakan tanah dengan pembayaran emas dan perak”. Demikian ini juga merupakan pendapat Sa’id ibn al-Musayyab, Urwah, al-Qasyim, as-Syafi’I, dan Hanafiyyah, Imam an-Nawawi menyatakan demikian inilah pendapat yang rajah dan diikuti.

Ini karena kedudukan barang identic dengan harga. Adapun tentang makanan, Imam Malik melarangnya secara total, baik dari hasil yang keluar dari tanah itu atau lainnya. Namun, tiga Imam mazhab lain membolehkannya berdasarkan Hadits ibn al-Dhahhak *Radhiyallahu ‘anhu*;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يُزَرَ عِلْمٌ بِمُؤْجَرَةٍ وَقَالَ لَا بَأْسَ [رواه مسلم]

Artinya:

“bahwa Rasulullah Saw. Telah melarang bermuzara’ah dan memerintahkan sewa-menyewa saja dan Rasulullah Saw. Bersabda itu tidak mengapa”

²⁰ <http://www.slideshare.net/riaburhani/fiqh-fix2> diakses pada jam 23.07 15/09/2015

Maksud dari diatas masih bersifat umum, mencakup makanan dan lainnya dari hasil tanah. Larangan dalam hadits diatas berlaku bagi *muzara'ah* yang rusak yang didominasi oleh unsur yang tidak tepat diketeui, *gharar*, tindakan aniaya terhadap salah satu pihak.

12. Zakat muzara'ah

Pada prinsipnya wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai nisab). Maka dalam kerja sama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik sawah dan penggarap) membayar zakat bila telah nisab.

13. Berakhirnya muzara'ah

Muzara'ah berakhir karena beberapa hal berikut:

a. Pekerja melarikan diri

Pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengategorikannya sebagai transaksi yang boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan yang mengategorikannya transaksi yang mengikat, maka pekerja tersebut akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan awal.

b. Pekerja tidak mampu mengerjakan

Pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya, akan tetapi pekerja tersebut mendapat upah apabila dia telah mengerjakan beberapa pekerjaan yang ia kerjakan.

c. Salah satu dari dua pihak ada yang meninggal

Berdasarkan pendapat orang yang mengategorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.

14. Hikmah Muzara'ah

Perlu diketahui bahwa sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Adapula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tapi tidak punya binatang ternak dan tidak mampu untuk menggarapnya. Kalau dijalin kerja sama antara mereka, dimana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luas daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.²¹

²¹ <http://www.slideshare.net/riaburhani/fiqh-fix2> diakses pada jam 23.07 15/09/2015

Transaksi bagi hasil kerja sama pengelolaan tanah pertanian (*muzara'ah*) juga mengandung unsur tolong-menolong antara dua belah pihak, yaitu bagi pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam hal ini transaksi muzara'ah yang positif akan terbangun apabila didasari oleh rasa saling percaya dan amanah.

Ali Ahmad Al-Jurjawi salah seorang Ulama' Al-Azhar dalam bukunya yang berjudul *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu*, dalam bab hikmah *muzara'ah*, yang menyebutkan bahwa adalah kerja sama dalam hal pertanian dalam kerja sama *muzara'ah* itu adalah *masyru'* atau disyariatkan oleh agama.²²

Hikmah selanjutnya dari pada muzara'ah adalah *Ihya' al-Mawat*. *Ihya' al-Mawat* adalah dua lafadz yang menunjukkan satu istilah dalam fiqh dan mempunyai maksud tersendiri. Bila diterjemahkan secara literer atau bahasa *ihya* berarti menghidupkan dan *mawat* berarti berasal dari maut yang berarti mati atau wafat.

Seadangkan pengertian *ihya' al-mawat* secara istilah menurut imam al Mawardi dalam kitab *al-iqna al khatib*, yang dimaksudkan *al-mawat* menurut istilah adalah: “tidak ada yang menanam, tidak halangan yang menanam, baik dekat yang menanam maupun jauh”.²³ Dalam hal ini peran kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* sangatlah besar, dengan menghidupkan atau mengolah kembali lahan pertanian yang telah mati atau tidak produktif karena ketidak mampuan pemilik tanah untuk mengelolanya, maka dengan kerja sama dalam bentuk

²² Ali Ahmad Al-Jurjawi, “*Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu*”, dalam Kholid Al-Atthor, Bab Hikmah MUzara'ah. (Cet. I ; Libanon: Al-Fikri,1994), h.125

²³ <http://taufiksimple.blogspot.com/2013/05/makalah-ihyaul-mawat.html> diakses pada jam 24.01 15/09/2015

muzara'ah lahan yang sudah tidak produktif dapat produktif kembali dan menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip tolong-menolong dalam kerja sama bagi hasil pengolahan tanah pertanian (*muzara'h*).

B. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Ekonomi Italia. Vilfredo Pareto, telah menspesifikasikan suatu kondisi atau syarat terciptanya alokasi sumberdaya secara efisien atau optimal, yang kemudian terkenal dengan istilah syarat atau kondisi pareto (*Pareto Condition*). Kondisi pareto adalah suatu alokasi barang sedemikian rupa, sehingga bila dibandingkan dengan alokasi lainnya, alokasi tersebut takkan merugikan pihak manapun dan salah satu pihak pasti diuntungkan. Atas kondisi pareto juga bisa didefinisikan sebagai suatu situasi dimana sebagian atau semua pihak individu takkan mungkin lagi diuntungkan oleh pertukaran suka rela.

Berdasarkan kondisi pareto inilah, kesejahteraan sosial (*social welfare*) diartikan sebagai kelanjutan pemikiran yang lebih utama dari konsep-konsep tentang kemakmuran (*welfare economics*).²⁴ Building dalam Swasono mengatakan bahwa “pendekatan yang memperkuat konsepsi yang telah dikenal sebagai *social optimum* yaitu *paretition optimum* (optimal ala Pareto dan Edgeworth), dimana efisiensi ekonomi mencapai *social optimum* bila tidak seorang pun bisa lagi menjadi lebih beruntung.

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach*.²⁵ Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah.

Berdasarkan pada beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan. Maka dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

²⁴Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Prakarsa, 2005), h. 5

²⁵ Albert dan Hannel. *Teori Kesejahteraan Tradisional*. (Yogyakarta: Lili Persada Press, 2005), h. 77

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indicator keberhasilan yang dapat diukur. Dalam hal ini menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.²⁶

2. Prinsip Kesejahteraan

Maka dapat diambil sebuah kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa prinsip-prinsip kesejahteraan adalah:

- a. Kepentingan masyarakat yang lebih laus harus didahulukan dari kepentingan individu.
- b. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.
- c. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

²⁶ Dye, Thomas R. *Pengertian Kebijakan Publik*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 15

Kesejahteraan individu dalam kerangka etika islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan social yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Jadi menurut Al-Qur'an kesejahteraan meliputi faktor:

1. Keadilan dan persaudaraan yang menyeluruh
2. Nilai-nilai system perekonomian.
3. Keadilan distribusi pendapatan.

3. Konsep kesejahteraan

Ekonomi islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayyah al-tayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting, kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan Negara.
- b. Tercukupi kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem Negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi.
- c. Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat, tidak mubazir.
- d. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
- e. Menjamin kebebasan individu.
- f. Kesamaan hak dan peluang.
- g. Kerjasama dan keadilan.

4. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

- a. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui pembangunan ketahanan pangan telah ditetapkan melalui peraturan presiden Nomor 7 tahun 2005, yakni program penelitian dan pengembangan IPTEK, program difusi dan pemanfaatan IPTEK dan program penguatan kelembagaan IPTEK system produksi.

b. P3TIP

Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP) atau Farmer Empowerment Throught Agricultural Tecnology and Information (FEATI) yaitu program yang dibiayai dari dana pinjaman Bank Dunia dengan dana pendamping dari APBN dan APBD, juga merupakan salah satu upaya agar UU No. 16/2006 tentang system penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan dapat dilaksanakan ditingkat lapangan.

Sesuai dengan UU No. 16/2006, kabupaten dan provinsi yang menerima dana program FEATI maka diwajibkan sudah memiliki kelembagaan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan ditingkat provinsinya adalah badan koordinasi penyuluhan dan tingkat kabupaten adalah Badan Pelaksana penyuluhan, dan di kecamatan adalah Balai penyuluhan.

Ada lima komponen yang dikembangkan dan difasilitasi dalam FEATI, yaitu:

1. Penguatan system penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani
2. Penguatan kelembagaan dan kemampuan aparat
3. Perbaikan pengkajian dan desiminasi teknologi
4. Penguatan pelayanan system informasi pertanian
5. Dukungan kebijakan dan manajemen proyek

c. PUAP

PUAP (pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) program utama Departemen Pertanian untuk tahun 2008 untuk penanggulangan kemiskinan dan

penciptaan lapangan kerja di pedesaan, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antar sub sector, dengan cara melakukan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan manajemen sehingga petani memiliki keterampilan.

d. Mengembalikan Kejayaan Koperasi

Mengembalikan kejayaan koperasi dengan pembinaan kepada INKOPTAN (Induk Koperasi Pertanian) disamping dari Departemen Koperasi dan UKM juga perlu diberikan kepada Departemen Pertanian. Dan PEMDA Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka ekonomi daerah, khusus dalam pemberian untuk menyalurkan sarana produksi pertanian.

Pembinaan Koperasi tidak terbatas pada Departemen Koperasi dan UKM, tetapi lain seperti Departemen Keuangan dan Lembaga Keuangan dengan memberikan subsidi bunga rendah kepada Koperasi. Misalnya Koperasi persusuan yang ingin melakukan impor bibit sapi perah.

e. Menggalakkan dan Mensosialisasikan SP3 (Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian)

Pemerintah telah membuat program penjamin kredit bagi petani/kelompok tani yang tidak memiliki agunan, yakni dengan mengembangkan Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3). Tujuannya adalah meningkatkan akses petani pada fasilitas kredit Bank pelaksanaan dan pemerintah yang mana selama ini usaha sector pertanian masih dianggap beresiko tinggi oleh kalangan

perbankan, sehingga menghambat aliran modal investasi maupun modal kerja ke sector pertanian.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut pemerintah melalui Departemen pertanian saat ini telah menetapkan lima bank yaitu: Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Jatim dan Bank NTB sebagai pelaksana. Namun bank yang telah ditetapkan belum mensosialisasikan kebijakan tersebut pada bank-bank jajarannya di daerah sehingga para petani belum mengetahui adanya kebijakan pemerintah dalam hal Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) tanpa agunan.

Lembaga perbankan syariah sangat tepat untuk mengembangkan sector agribisnis seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan baik bank umum syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah. Hal ini dikarenakan bank syariah menggunakan skema bagi hasil (Mudharabah, Muzara'ah, Musyarakah), disamping skema lainnya seperti jual beli salam dan mudharabah. Bank Islam tidak dikenal adanya perhitungan bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil dan pengambilan keuntungan secara jual-beli.

Dalam prinsip bagi hasil, besarnya pembagian porsi keuntungan antara pemilik dana (Bank) dan pengelola usaha (petani) diserahkan kepada kedua belah pihak tersebut disesuaikan masa panen. Dengan demikian, pada usaha pertanian yang kecil pendapatannya, nisabah yang disepakati akan tidak sama dengan usaha yang lebih besar pendapatannya. Setiap komoditi usaha pertanian memiliki tingkat

pendapatan yang berbeda, dan masa panen menghasilkan yang berbeda pula. Petani tidak dibebani dengan bunga pinjaman, melainkan pengembalian secara otomatis disesuaikan dengan masa panen.

C. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis dengan membaca berbagai referensi penulis belum mendapatkan, ada penelitian atau kajian ilmiah yang khusus yang mengkaji masalah penerapan system muzara'ah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sehingga penulis merasa memiliki tanggung jawab untuk menulis skripsi tersebut.

Sebagai persyaratan sebuah karya ilmiah, penulis mengutip berbagai sumber referensi yang menunjang dan memiliki relevansi dengan pembahasan penulis, seperti buku Mardani, dalam karyanya: *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Membahas tentang masalah muzara'ah dari segi fiqh muamalah dan memuat tinjauan hukumnya secara syara' yang bersifat praktis (amaliah)

Ghazaly, Abdur Rahman., Th.I, Ihsan , Ghufro dan Shidiq, Sapiuddin, dalam bukunya *Fiqh Muamalat*. Buku ini memaknai muamalah sebagai suatu pengetahuan tentang kegiatan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari berdasarkan syariat Islam. Buku ini juga menekankan bahwa dalam muamalah atau perekonomian harus didasarkan pada ketentuan syariat yang

peroleh dari dalil-dalil yang terperinci serta akurat, dan *muzara'ah* masuk dalam salah satu bab yang di bahas dalam buku ini.

Bungin, Burhan, dalam bukunya *Penelitian Kualitatif*. Buku ini membahas tentang tehnik pengolahan data-data yang berkaitan dengan penelitian kualitatif.

Muhammad, Abdullah Ath- Thayyar, Th.I. Muhammad, Abdullah Al Muthlaq dan Ibrahim, Muhammad, dalam karya ilmiahnya *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mahzhab*, membahas tentang muatan berbagai persoalan fiqh termasuk didalamnya *muzara'ah* baik secara klasik maupun terkini.

Jawad, Muhammad Mughniyah, dalam bukunya *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, memaparkan dalam bab *muzara'ah* secara spesifik tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penerapannya, baik dari segi syarat-syarat, rukun, masalah-masalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan *muzara'ah*. Dan adapun buku ini menurut hemat penulis agak sedikit mengena dengan permasalahan yang dimasyarakat saat ini.

Anwar, Syamsul, dalam bukunya *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, membahas tentang hukum perjanjian syariah, yang merupakan bagian dari hukum perikatan syariah secara umum.

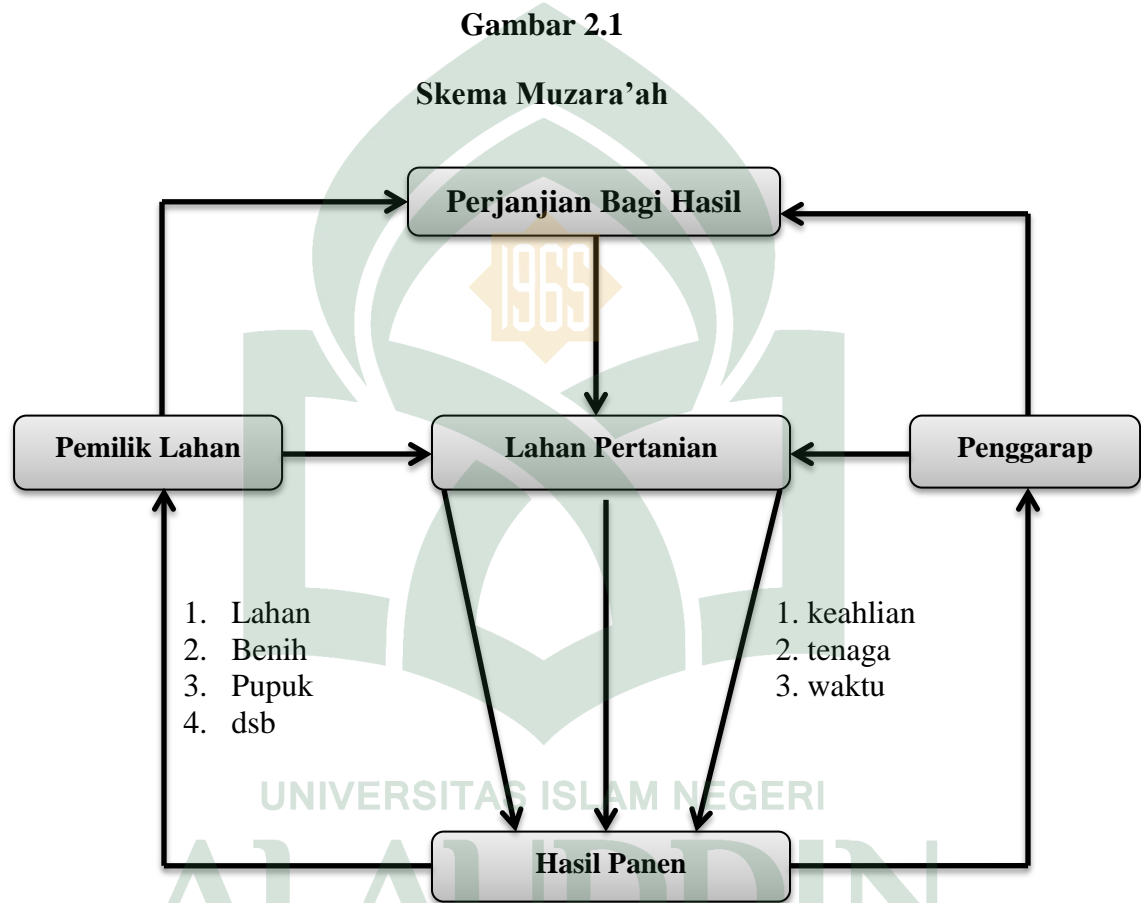
Syafi'I, Muhammad, dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah, Studi pengenalan Umum*, menggambarkan secara umum tentang skema penerapan *muzara'ah* secara lebih terperinci.

Muhammad Baqir Ash Shadr dalam bukunya berjudul *Buku Induk Ekonomi Islam*, yang menjelaskan secara ilmiah bagaimana hubungan-hubungan itu dapat dipahami secara rasional-spiritual untuk kemudian direkomendasikan resep-resep dasar guna merespon dalam bentuk membangun suatu system ekonomi yang disebut "Ekonomi Kita" kajian ini sejalan dengan tulisan yang diperkuat oleh Asy Syatibi yaitu tujuan Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia.

Dwi Condro Triono, Ph.d, Dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Islam Madzhab Hampara*, menjelaskan tentang aliran ekonomi yang disusun konsep ekonomi yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dua kitab yang merupakan karunia yang paling agung dari Allah SWT untuk kepentingan umat manusia dari zaman ini. Sebagaimana ilmu-ilmu ekonomi sekarang ini tengah marak berkembang. Ibarata sebuah pohon, maka aliran ekonomi ini memiliki akar, batang, cabang, ranting, daun hingga buah yang berbeda dengan pohon ekonomi konvensional.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan penelitian dan teori yang telah dipaparkan maka disusun bagan kerangka pikir sebagai berikut.



di adopsi dari Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah, suatu pengenalan umum

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dekskriptif (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.²⁷ Sedangkan penelitian ini dilakukan di Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah:

1. Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang dilakukan peneliti melalui interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.
2. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan teks-teks Al-Qur'an yang menyangkut tentang isi penelitian.

C. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani informan. Dalam penelitian data primer terdiri dari petani

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 17.

penggarap sawah dan pemilik sawah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman (*interview guide*) yang jawaban diberikan secara terbuka, serta tokoh-tokoh masyarakat juga ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan informan yang terdiri dari Lurah, Imam Desa dan Imam Dusun sebagai data pelengkap yang tidak diperoleh dari responden.

2. Data primer

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian. Atau data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait langsung dengan penelitian ini, seperti Kantor Lurah Palampang dan Kantor Camat Rilau Ale.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari data bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.²⁸

Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian yaitu analisis

²⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) h. 12

ekonomi islam terhadap perjanjian akad muzara'ah tanah garapan petani di Kelurahan Palampang, kecamatan Rilau Ale, Kabupabten bulukumba.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, gambar dan lain sebagainya.²⁹ Hasil penelitian dari observasi dan wawancara. Akan lebih kredibel/dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data atau mendapatkan keterangan lisan melalui Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan.³⁰ Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan semiterstruktur, yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui jelas keadaan/ kondisi penerapan system muzara'ah pada masyarakat petani padi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

E. Instrumen Penelitian

Dengan melihat permasalahan yang hendak diukur dan diteliti dalam penelitian ini maka penulis mengadakan instrumen sebagai berikut:

²⁹ Suharsini Arikonto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) h. 231

1. Interview yakni mengadakan proses Tanya jawab atau wawancara dengan informan yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.
2. Dokumentasi, yakni suatu metode pengumpulan data dengan cara membuka dokumen atau catatan yang dianggap perlu.

F. Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerhanaan, pengabstraan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus-menerus. Reduksi data meliputi : meringkas data, mengkode dan menelusur tema.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik jaringan dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan- penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal.

G. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan dari segala sisi. Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji validitas internal (*credibility*), uji validitas eksternal (*transferability*) dan reabilitas (*defendentbility*).

1. Uji validitas internal

Uji validitas internal dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai informan. Kriteria ini berfungsi melakukan *inquiry* sedemikian rupa sehingga kepercayaan penemuannya dapat dicapai.

Untuk hasil penelitian yang kredibel, terdapat lima teknik yang diajukan yaitu:

a. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti peneliti akan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan.

b. Triangulasi data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang memiliki sudut pandang yang berbeda.

c. Diskusi dengan teman

Peneliti melakukan diskusi dengan orang lain agar data lebih valid.

d. Menggunakan bahan referensi.

Peneliti menggunakan pendukung rekaman wawancara untuk membuktikan data penelitian.

e. Mengadakan *member check*

Data yang ditemukan peneliti akan diklarifikasi kepada pemberi data agar data benar-benar valid.

2. Uji validitas Eksternal

Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat di generalisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif

memiliki sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, penelitian kualitatif tetapi tidak dapat dikatakan memiliki keabsahan eksternal terhadap kasus- kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama.

Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian ini untuk selanjutnya dapat diterapkan, maka pembuatan laporan ini akan dibuat secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi lebih jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat dapat memutuskan bisa atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran sedemikian jelasnya, semacam apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar *transferability*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

1. Latar Belakang Kelurahan Palampang

Kabupaten bulukumba adalah salah satu tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu phinisi yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah Daerah. Luas wilayah kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km² dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 km.

Kecamatan Rilau Ale merupakan wilayah agraris dan mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani namun ada juga yang mata pencahariannya sebagai pedagang. Kecamatan Rilau Ale memiliki 13 Kelurahan atau desa termasuk kelurahan Palampang.

Kelurahan Palampang sendiri memiliki luas wilayah 7,65 Km². dimana wilayah terluas di dominasi wilayah persawahan, adapun wilayah lain seperti perkebunan dalam selebihnya sebagai tempat pemukiman masyarakat,

berbagai macam hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, coklat, merica cengkeh, rambutan, durian, dan lain-lain.³¹

2. Letak geografis

Kelurahan palampang merupakan dataran rendah yang terletak 2250 meter di atas permukaan laut terletak di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Bulukumba
- b. Sebelah selatan : Desa Bonto Haru
- c. Sebelah timur : Kecamatan Bulukumba
- d. Sebelah Barat : Desa Bajiminasa

Kelurahan Palampang terdiri dari 5 Lingkungan antara lain sebagai berikut:

- a. Lingkungan Marana
- b. Lingkungan Batu Pangka
- c. Lingkungan Darincing
- d. Lingkungan Tammasongo
- e. Lingkungan Palampang

³¹ Data geografis Kabupaten Bulukumba (palampang) tahun 2014

3. Keadaan Demografis

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sebanyak 2.654 jiwa yang terdiri dari:

1. Laki-laki : 1.235 jiwa
2. Perempuan : 1.419 jiwa

b. Jumlah kepala keluarga menurut jenis kelamin

Jumlah penduduk di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

Tabel 4.1

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk (orang)	Ket
1	0-4	281	
2	5-9	442	
3	10-14	450	
4	15-24	657	
5	25-40	533	
6	≤ 50	291	
Jumlah		2.654	

Sumber : Kantor Kelurahan Palampang, 2015

4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Kelurahan palampang merupakan salah satu bidang dalam wilayah kecamatan Rilau Ale merupakan pusat pemerintahan dalam bidang pendidikan, agama, kesehatan serta perekonomian di Kabupaten Bulukumba, pada umumnya mata pencaharian Kelurahan Palampang adalah 90% disektor pertanian selebihnya pedagang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- a. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Table 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Ket
1	Petani	1572	
2	Pegawai	328	
3	Pedagang	500	
4	Jasa	54	
5	Lain-lain	200	
	Jumlah	2.654	

Sumber : Kantor Kelurahan Palampang, 2015

- b. Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Palampang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1	Tidak tamat SD	586	
2	SD	461	
3	SLTP	534	
4	SLTA	635	
5	Sarjana Muda	196	
6	Sarjana Lengkap	242	
Jumlah		2.654	

Sumber : Kantor Kelurahan Palampang, 2015

B. Penerapan Sistem Muzara'ah di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, alur dari system penerapan akad *muzara'ah* di kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, menjelaskan tentang sebab maupun alasan yang mendasari mereka melakukan akad *muzara'ah*, bentuk-bentuk system akad *muzara'ah* yang terjadi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, subyek dan obyek perjanjian system akad *muzara'ah* serta jangka waktunya dalam

system akad *muzara'ah* yang terjadi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

1. System perjanjian akad muzara'ah

Pada umumnya pemilik lahan yang datang kepada penggarap meminta tolong agar sawahnya digarap karena kondisi waktu yang kurang ditambah adanya kesibukan lain namun terkadang pula penggarap yang mendatangi pemilik lahan karna melihat sawah yang produktif namun tidak dimanfaatkan, setelah kedua belah pihak mengadakan pertemuan entah itu atas inisiatif pemilik lahan maupun atas kehendak penggarap dengan tujuan agar mengadakan akad/perjanjian baik tertulis maupun lisan. Namun peneliti kebanyakan menemukan akad secara lisan.

Salah satu pemilik lahan yang sempat saya mintai keterangan memaparkan akad yang dilakukan dengan petani penggarap, beliau menawarkan sawahnya yang luasnya kurang lebih 1 hektar untuk di garapkan karna factor usia yang sudah tidak mampu lagi menggarap sawah. Pada saat itu petani penggarap mengiakan dan bersedia menggarap sawah beliau. Setelah mereka melakukan kesepakatan akad, kemudian kedua belah pihak bermusyawarah mengenai tata cara penggarapannya. Penggarap bersedia melakukan penanaman dan pengolahan sampai siap panen, setelah itu hasil panen dikumpulkan menjadi satu (biasanya dikumpulkan di tempat penggilingan padi). Biasanya, sebelum dibagi hasil panennya, hasil kotor dari panen tersebut dikurangi dahulu untu bibit yang telah

diserahkan diawal, biaya pupuk, biaya/gaji para pekerja (kalau ada) kemudian setelah itu baru dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal akad.³²

Penulis menarik kesimpulan selama proses penelitian berlangsung penyebab masyarakat kelurahan palampang melakukan akad *muzara'ah*, yaitu sebagai berikut:

a. Bagi pemilik lahan

1. Karena mereka yang sudah tua sehingga mereka tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menggarap lahan mereka sendiri.
2. Karena adanya pekerjaan lain mereka (pedagang), sehingga mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurus lahan mereka. Meskipun sebenarnya mereka bisa menggarapnya sendiri.
3. Karena pemilik lahan sudah tidak mempunyai suami lagi (Janda) dan tidak sanggup menggarap lahannya sendiri.
4. Untuk menolong petani yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.
5. Karena pemilik lahan mempunyai pekerjaan tetap (PNS) sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk menggarap sawahnya.

³²Nasir, *pemilik lahan*, wawancara dengan penulis pada tanggal 28 Desember 2015.

b. Bagi petani penggarap

1. Karena mereka tidak mempunyai lahan pertanian, walaupun mereka mempunyai keahlian, sehingga mereka menerima lahan orang untuk mereka garap.
2. Untuk mencari penghasilan tambahan karena lahan yang dimilikinya hanya sedikit.

2. Pendapat Narasumber di Wilayah Objek Penelitian

Menurut para narasumber di wilayah objek penelitian tentang akad *muzara'ah* di kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, yaitu sebagai berikut:

a. Pernyataan dari Pak Nasir mengenai system *muzara'ah*.

“narasumber mengatakan bahwa akad *muzara'ah* bisa lebih menguntungkan daripada bentuk-bentuk pengolahan tanah lainnya, karena mereka dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk melakukan pekerjaan lain seperti menjual , bertani, berkebun dan lain-lain.”³³

b. Sedangkan Pak Bahar berpendapat lain alasannya sebagai berikut.

“Bahwa akad *muzara'ah* tersebut sama, apabila lahan tersebut dikerjakan oleh sipemilik lahan sendiri, artinya baik pemilik lahan maupun petani penggarap sama-sama memperoleh modal yang telah dikeluarkan atau dengan kata lain, hasil yang mereka peroleh sama dengan biaya yang telah dikeluarkan, jadi mereka tidak untung dan juga tidak rugi.”³⁴

³³ Nasir, *Pemilik Lahan*, wawancara dengan penulis 28 November 2015

³⁴ Bahar, *Petani Penggarap*, wawancara dengan penulis 1 Desember 2015

3. Waktu Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Waktu berakhirnya akad *muzara'ah* di kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba ini tidak dibatasi waktunya. Sebagai pernyataan dari Ibu Hasni.

“Apabila si penggarap masih kuat untuk menggarap maka perjanjian tersebut akan terus berlangsung, tetapi apabila si penggarap tidak kuat atau tidak serius maka perjanjian tersebut bisa diakhiri, bila petani penggarap bisa juga dilimpahkan kepada orang ketiga atau bisa juga dari pemilik yang menginginkan perjanjian tersebut berakhir karena hasil yang diperoleh selalu tidak bagus. Oleh karena jangka waktu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Artinya para pihak baik pemilik lahan maupun petani penggarap dapat mengakhiri perjanjian kapan saja, meskipun dalam hal ini salah satu pihak belum atau tidak ingin mengakhiri perjanjian tersebut.”³⁵

Berdasarkan pendapat diatas, dalam akad *muzara'ah* tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya, apakah hanya satu kali musim panen, atau dua kali musim panen atau yang lainnya. Maka praktek tersebut bisa dikatakan tidak sah menurut jumhur ulama dan bisa dikatakan sah menurut Imam Hanafi.

4. System bagi hasil akad *muzara'ah* bagi petani padi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba

Adapun pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat petani padi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sebagai berikut : apabila benih yang ditanam dari pemilik lahan, artinya benih

³⁵ Hasni', *pemilik Lahan*, wawancara dengan penulis pada tanggal 30 November 2015

yang digunakan untuk luas 1 hektar berjumlah 50 liter, maka hasil panen yang diperoleh dikurangi terlebih dahulu untuk benih. Sebagaimana contoh yang berikan Pak Nasir mengenai system bagi hasilnya yaitu :

“Jika luas lahan 1 hektar dengan hasil yang diperoleh kurang lebih 60 karung, maka hasil kotor tersebut dikurangi terlebih dahulu untuk benih, biaya pupuk, biaya traktor, biaya para pekerja (kalau ada) serta biaya-biaya lainnya yang dipakai selama masa penggarapan, pembagian hasil tersebut setelah dikurangi sekian karung atas biaya-biaya yang telah dipakai selama penggarapan berlangsung, baru setelah itu dibagi dengan persentase (50:50).”³⁶

Ada juga yang berpendapat lain, sebagaimana yang dikatakan oleh pak Bahar,

“di samping disisihkan dahulu untuk pengambilan bibit yang diserahkan di awal, hasil kotor dari panen tersebut masih disisihkan sekian karung untuk biaya-biaya lainnya selama masa penggarapan, setelah itu dibagi sepertiga sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jadi misalkan hasil kotornya 60 karung dikurangi/disisihkan dulu untuk bibit (misal pemilik lahan yang menyertakan bibit diawal sebesar 50 liter benih/gabah) maka hasil kotor tersebut dikurangi sebesar 50 liter, kemudian dikurang untuk biaya pupuk (1 zat pupuk = Rp 130.000) sedangkan 1 karung gabah di kelurahan Palampang dihargai Rp 350.000 (100 Kg × Rp 3.500), biaya traktor (misal Rp 120.000), serta biaya-biaya lainnya sebesar 1 karung, setelah itu baru dibagi antara pemilik tanah dan petani penggarap.”³⁷

Kegiatan tersebut merupakan kebiasaan penduduk setempat, alasan dikemukakan adalah bahwa pengurangan benih terhadap hasil panen yang belum dibagi merupakan pengembalian terhadap modal berupa benih yang telah diberikan dan sudah seharusnya dipergunakan kembali untuk penanaman

³⁶ Nasir, *pemilik Lahan*, wawancara dengan penulis pada tanggal 28 November 2015

³⁷ Bahar, *petani penggarap*, wawancara dengan penulis pada tanggal 1 Desember 2015

selanjutnya agar ketika awal tanam lagi tidak kesulitan mencari benih. Namun perlu digaris bawahi hal semacam ini terjadi apabila pemilik lahan dan petani penggarap melakukan perjanjian penggarapan kembali, artinya kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan lagi kerjasamanya.

Berbicara tentang modal, kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap di bidang pertanian dengan system bagi hasil panen, terdapat ketentuan-ketentuan pembagian keuntungan dimana keuntungan akan dibagi antara para pihak dalam usaha yang berdasarkan bagian-bagian yang mereka tetapkan sebelumnya yang disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan. Keuntungan merupakan pertumbuhan modal dan kerugian adalah pengurangan modal.

Undang-undang No 2 tahun 1960 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hasil tanah ialah hasil bersih yaitu, hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak, dan biaya untuk menanam.

Pembagian hasil panen tiap pihak harus dilakukan berdasarkan persentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Menurut pengikut Mahzhab Hanafi dan Hanbali, perbandingan persentase keuntungan dari hasil panen harus ditentukan dalam kontrak (perjanjian). Penentuan tentang jumlah yang pasti bagi setiap pihak yang diperbolehkan, sebab seluruh hasil panen (keuntungan) tidak mungkin direalisasikan dengan melampui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan pihak lain tidak memperoleh bagian dari hasil panen

tersebut. Menurut pendapat pengikut Syafi'i pembagian hasil tidak perlu ditentukan dalam perjanjian, karena setiap pihak tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi benih/modal yang diberikan dan tingkat ratio keuntungan dari hasil panen. Sedang menurut Nawawi keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan proporsi benih/modal yang diberikan, apakah diturut kerja atau tidak, bagian tersebut harus diberikan dengan porsi yang sama antara setiap pihak.

Para pengikut madzhab Syafi'i tidak membolehkan perbedaan antara perbandingan bagi hasil panen dengan kontribusi benih/modal yang disertakan dalam perjanjian, sedangkan menurut pengikut madzhab Hambali dan Hanafi pembagian tersebut sedapat mungkin dilakukan secara fleksibel. Setiap pihak dapat membagi hasil panen berdasarkan ketentuan porsi yang sama atau tidak sama. Misalnya pihak yang memberikan $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan modal dapat memperoleh $\frac{1}{2}$ atau lebih dari keuntungan. Prinsipnya setiap pihak berhak mendapatkan keuntungan dari hasil panen yang ditentukan oleh beberapa hal yaitu modal, peran dalam pekerjaan dan tanggung jawab dalam perjanjian.

Sesuai uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa syarat akad *muzara'ah* dimana hasil merupakan milik bersama orang yang berakad tanpa ada ada pengkhususan lebih dahulu, belum dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat pelaku akad *muzara'ah* di kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

Sekalipun begitu tata cara pembagian hasil panen tersebut menurut masyarakat setempat sudah merupakan tradisi, dimana sudah seharusnya benih yang akan ditanam berasal dari kedua belah pihak maka sebelum hasil panen dibagi terlebih dahulu melakukan pengurangan benih dan biaya-biaya lainnya selama dalam masa penggarapan. Kemudian sisa baru dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sedangkan dalam syara' dijelaskan bahwa apabila suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan adat harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam kaidah Fiqh bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Sesuai uraian diatas, meskipun pelaksanaan akad *muzara'ah* yang terjadi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba belum sesuai dengan konsep *muzara'ah* yang ada dalam fiqh Islam, akan pelaksanaan tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat setempat yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan Kelurahan Palampang.

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat didalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat. Diperlukan sesuai pemikiran-pemikiran baru yang berupa Ijtihad termasuk didalamnya tradisi kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat.

Tradisi ini dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa tradisi ini tidak mungkin berkenaan dengan mkasiat, perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang-ulang, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Apabila tradisi tersebut dapat memenuhi kriteria di atas, maka bisa dikatakan *urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber ijtihad. Tata cara pembagian hasil panen berdasarkan asal benih yang akan ditanam merupajan bentuk kebiasaan tersendiri, oleh karena itu pelaksanaannya dapat dilakukan secara *urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum :

1. Proses pengambilan panen dilakukan berdasarkan kesepakatan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat, karena masyarakat kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dalam melakukan akad *muzara'ah* adalah mereka yang sudah berkeluarga dan perbuatan tersebut sudah menjadi tradisi tersendiri yang berpijak pada kemanfaatan dunia dan akhirat.
2. Proses akad *muzara'ah* yang dilakukan di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits. Rukun dan syaratnya tidak didasarkan pada hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.

3. Proses akad *muzara'ah* ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga saling memperkuat tali persaudaraan baik untuk pemilik lahan maupun untuk petani penggarap. Meskipun saat ini hasil tidak seimbang biaya yang dikeluarkan oleh penggarap.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian akad *muzara'ah* di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba adalah *urf* apa yang bisa dijalankan orang baik dalam kata-kata maupun perbuatan atau identic dengan adat dan kebiasaan.

C. Penerapan Sistem Muzara'ah dalam perspektif Ekonomi Islam yang terjadi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa akad muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami untuk dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen dan benihnya disediakan oleh pemilik lahan.

Dibawah ini penulis kemukakan beberapa bentuk akad *muzara'ah* yang terjadi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

1. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik tanah, benih yang akan ditanam serta pengolahan berasal dari petani penggarap. Dalam bentuk ini pemilik tanah hanya memiliki tanggungan yakni pembayaran pajak tanah hak milik. Sedangkan tanggungan petani penggarap, yang meliputi penyemaian benih, penanaman, pembajakan dan peralatan lahan, pengairan, pemberian pupuk, penyuburan lahan sampai tiba waktunya panen.
2. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik lahan, alat, tenaga dan biaya dari petani penggarap, sedangkan benih dan pupuk dibagi dua (50% dari pemilik lahan 50% dari petani penggarap). Dalam bentuk ini pemilik tanah dibebani pajak tanah yang diolah. Sedangkan petani penggarap memiliki tanggungan semua yang berhubungan dengan pengolahan termasuk di dalamnya adalah perawatan dan pemeliharaan tanaman.
3. Lahan pertanian yang akan dikerjakan serta benih yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan, alat dan kerja dari penggarap. Dalam bentuk ini yang menjadi tanggungan pemilik lahan adalah pajak dan seluruh jumlah benih yang diperlukan untuk ditanam, adapun yang akan menjadi tanggungan petani penggarap hanya berhubungan dengan pengolahan yang dikerjakan.

Ketiga bentuk akad *muzara'ah* yang kebanyakan diterapkan di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba adalah bentuk kedua dan ketiga dimana bentuk kedua yaitu lahan yang diolah berasal dari pemilik lahan, sedangkan benih dan pupuk berasal dari kedua pihak baik dari pemilik dan penggarap, sedangkan sedangkan biaya pengolahannya semua berasal dari penggarap. Sementara bentuk ketiga yaitu lahan yang diolah serta bibit berasal dari pemilik lahan, sedangkan alat dan kerja berasal dari petani penggarap, sedangkan pengolahannya semua berasal dari penggarap.³⁸ Bentuk seperti inilah yang banyak diterapkan oleh mayoritas penduduk Kelurahan Palampang Kecamatan Rilay Ale Kabupaten Bulukumba dengan system bagi hasil terutama bagi hasil tanaman padi.

Jumlah benih yang disediakan harus menyesuaikan dengan lahan yang digarap. Misalnya untuk luas 1 hektar membutuhkan benih kurang lebih 50 liter benih. Apabila benih disediakan oleh pemilik lahan, maka pemilik lahan mempunyai tanggungan benih 50 liter benih yang akan ditanam, begitu pun sebaliknya. Jika benih dibagi kedua antara pemilik lahan dan petani penggarap, maka masing-masing pihak menyediakan benih 25 liter.

³⁸ Nasir , *pemilik Lahan* , wawancara dengan penulis pada tanggal 1 Desember 2015

Jenis benih yang akan ditanam harus disepakati pemilik lahan dan petani penggarap. Setelah ada kesepakatan maka jenis benih yang telah disepakati yang akan ditanam. Hal ini biasanya didasarkan dari berbagai pertimbangan, salah satunya yaitu jenis benih yang sesuai dengan karakter tanah yang nantinya akan diolah petani penggarap, apakah jenis padi yang berumur panjang atau berumur pendek. Atau bisa juga karena menyesuaikan dengan jenis padi yang ditanam disekitar lahan yang diolah oleh petani penggarap.

Pelaku dalam akad *muzara'ah* yaitu petani penggarap dan juga pemilik lahan pertanian. Sedangkan yang diperjanjikan dalam akad *muzara'ah* ini adalah tanaman padi dan tenaga kerja, tanaman padi berada dengan tanaman-tanaman lainnya. Biaya penanaman, pengolahan dan perawatan padi harus mempunyai ketelitian dan keahlian tertentu karna tanaman padi mudah terserang hama (penyakit). Padi juga tergolong tanaman yang *sensitive* terhadap cuaca.

Pak Nasir mengatakan bahwa : “kebanyakan penggarap sawah tidak mendapatkan pembelajaran secara khusus cara dalam menanggulangi jenis hama yang dapat merusak tanaman padi, mereka hanya belajar berdasarkan pengalaman sehari-hari dan kebiasaannya. Hal ini uang mengakibatkan para penggarap sawah tidak mampu menanggulangi sebagian sawah mereka apabila terjadi musim hama padi sehingga biaya penanaman menjadi lebih tinggi.”³⁹

Dilihat dari perspektif ekonomi islam, penerapan akad *muzara'ah* yang terjadi Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Dimana ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang berdasarkan pada sumber hukum islam, yaitu al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan

³⁹ Nasir, *Pemilik Lahan*, wawancara dengan penulis pada Tanggal 1 Desember 2015

Qiyas. Sehingga dalam hukum dalam ekonomi Islam harus berbasis minimal kepada keempat tersebut, agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filosofi yang terdapat dalam ekonomi Islam.

Jadi bisa dikatakan bahwa semua aktivitas manusia di muka bumi ini harus berlandaskan pada prinsip dan filosofi yang terdapat dalam ekonomi Islam, yaitu seperti prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh M.A Choudury:

1. Prinsip tauhid dan persaudaraan

Konsep ini menjelaskan hubungan antar manusia dengan Tuhannya. Jadi segala aktivitas yang dilakukan oleh muslim akan selalu tetap terjaga, karena mereka merasa bahwa Allah SWT. Selalu melihat apa yang dilakukannya atau sementara konsep persaudaraan atau yang biasa disebut dengan Ukhuwah Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan kerjasama yang tulus antar sesama muslim dalam aktivitas ekonomi.

Menurut penulis, penerapan akad *muzara'ah* yang terjadi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sendiri sudah sesuai dengan prinsip tauhid dan persaudaraan. Hal ini dibuktikan dari cara pemilik lahan dan petani penggarap bertransaksi dan saling mempercayai satu sama lain dalam berakad. Dengan adanya akad *muzara'ah* ini maka persaudaraan antara pemilik lahan dengan

petani penggarap akan menghasilkan hubungan harmonis, yang dahulu tidak kenal dan saling dan menjadi saling mengenal satu sama lain.

2. Prinsip bekerja dan produktivitas

Ekonomi Islam mengajarkan individu untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas yang tinggi agar dapat memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat.

Dalam pelaksanaan akad *muzara'ah* ini penggarap dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga, yaitu hasil panen yang layak dan bisa menguntungkan pihak pemilik lahan dan petani penggarap.

3. Prinsip distribusi kekayaan yang merata dan adil

Proses redistribusi kekayaan yang adil ini bertujuan untuk pemeratakan kekayaan antara pihak yang kaya dan juga oleh pihak yang miskin.

Rata-rata orang yang mempunyai lahan sendiri yang diserahkan kepada penggarap adalah dari kalangan orang yang berkucupan, sedangkan mayoritas penggarap yang ada di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba berasal dari golongan menengah ke bawah yang memang menggantungkan kehidupannya pada pertanian dan salah satunya dengan perjanjian bagi hasil ini.

Selain dari ketiga prinsip di atas, dalam ilmu ekonomi Islam dikenal dengan asas-asas dalam ekonomi Islam, yaitu:

1. Asas suka sama suka (asas sukarela)

Asas ini bukan kerelaan yang sifatnya semu atau sementara kerelaan itu harus dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk muamalah yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan akad *muzara'ah* ini pemilik lahan dengan sukarela menyerahkan lahannya untuk digarap oleh penggarap dengan perjanjian bagi hasil pada waktu hasil panen tiba. Dan penggarap pun dengan sukarela menerima lahan tersebut untuk digarap dan menghasilkan. Artinya antara kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap) tidak ada keterpaksaan untuk melakukan akad ini.

2. Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan petani penggarap di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba ada yang berpendapat bahwa dalam bagi hasil yang terjadi sudah sesuai dengan perjanjian di awal akad dan saling menguntungkan antara keduanya. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa bagi hasil yang mereka terima ketika panen tidak

sesuai dengan kerja dan biaya pengolahan yang dikeluarkan penggarap dari awal penanaman sampai panen tiba.

3. Asas saling tolong menolong

Asas tolong menolong berarti terjadi kesukarelaan antara dua belah pihak yang saling membantu, dalam artian ada pihak yang mendominasi.

Dalam akad *muzara'ah* bisa dikatakan sudah mengandung asas tolong menolong, karena tidak didasari pemilik lahan sudah membantu para penggarap untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan penggarap juga telah menolong pemilik lahan untuk mengolah lahannya yang rata-rata pemilik lahan ini tidak sempat atau tidak memiliki waktu luang untuk mengolah lahannya sendiri. Jadi tidak ada salah seorang pihak pun yang memegang hak lebih (lebih baik dari pemilik lahan maupun petani penggarap).

Kesimpulan penulis tentang akad *muzara'ah* ini dilihat dari perspektif ekonomi Islam, dari mulai prinsip dasar dan juga dilihat dari asas-asas ekonomi islam yang ada. Maka system akad *muzara'ah* merupakan akad yang baik untuk diterapkan dan mengikut pada zaman saat ini. Akan tetapi yang harus menjadi perhatian bagi akad *muzara'ah* yaitu perjanjian akadnya hendaknya dituangkan dalam

perjanjian tertulis agar tidak terjadi kesalah pahaman atau yang dirugikan antara pemilik lahan dengan petani penggarap.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang diperoleh seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa, penerapan, sistem *muzara'ah* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Belum sepenuhnya dilakukan berdasarka aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai menurut kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *muzara'ah* dan pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Proses transaksi *muzara'ah* dilakukan di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dapat dikategorikan kerja sama yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat atau kebiasaan (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits serta tidak mengandung mudharat. Dan dilakukan atas dasar kesepakatan dan keridhan dan pemilik tanah dan petani penggarap. Dipandang dari perspektif ekonomi Islam, akad *muzara'ah* yang dilaksanakan di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sebagian besar sudah sesuai dengan asas ekonomi Islam yang ada, yaitu : asas suka rela, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas saling menolong.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Tata cara dalam akad *muzara'ah* sekarang ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.
2. Toleransi sangat dibutuhkan antara kedua belah pihak di dalam sebuah kerja sama yang berbentuk sistem *muzara'ah*, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.
3. Untuk menghindari perselisihan antara pemilik lahan dan petani penggarap, penulis menyarankan agar perjanjian tentang jangka waktu berlakunya akad diperjanjian awal untuk menghindari gharar.
4. Hendaknya dalam melakukan akad *muzara'ah* harusnya dilakukan dengan cara tertulis, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pemilik lahan dan petani penggarap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Thayyar. 2009. *“Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mahzhab,”* Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi.
- Abdullah, Bin Abdurrahman. 2005. *“Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim,”* Jakarta : Darul Falah.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2010. *“Fathul Baari (Kitab Shahih Al-Bukhari)”*, Jakarta: Buku Islam Rahmatan Cet.2.
- Al- Jurjawi. 1994. *“Hikamh At-Tasyri’ Wa Falsatatuhi”* Libanon: Dar Al-Fikri
- Al-Mishri, Abdul Sami’. 2006. *“Pilar-pilar Ekonomi Islam”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin. 2010. *“Penelitian Pendidikan”* Yogyakarta: Lilin Persada Press.
- Az-Zuhaili. 1997. *“Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatu”*, Damascus: Darul –Fikri, Cet 2 Vol. VI
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *“Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Muamalah)”*, Yogyakarta: UII Press
- Basyir, Ahmad Azhar. 1978. *“Garis-garis Besar Ekonomi Islam”*, Edisi Revisi, Yogyakarta: BPFE.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *“Al-Qur’an dan Terjemahan”*, Semarang: CV. Alwah.
- <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/halal/4021262.html>.
- <http://taufiksimple.bkogspot.com/2013/05/makalah-ihyatul-mawat.html>
- Jawad, Agus Muqhnayah. 2009. *“Fiqh Imam Ja’far As-Shadiq”* Jakarta: Lentera.
- Mardani. 2012. *“Fiqh Ekonomi Islam”*, Jakarta: Kencana.

- Moleong, Lexy J. 2002. *“Metologi Penelitian Kualitatif”*, Bandung: Rosdakarya.
- Mardalis. 1990. *“Metologi Penelitian Suatu Pendidikan Proposal”*, Bandung: Bandar Maju.
- Rawas Qal’aji, Muhammad. 1985. *“Mu’jam Lughat Al-Fuqaha”*, Beirut : Darun-Nafs
- Rosidi, Imron. 2015. *Sukses Menulis Karya Ilmiah Suatu Pendekatan dan Praktek”*, Surabaya: Sidogiri.
- Shihab Quraish. 2001. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an”*, Tangerang: Lentera Hati.
- Suyatno. 2011. *“Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh”*, Jakarta: Kencana.
- Syafi’I Antonio, Muhammad. 1999. *“Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum”*, Jakarta: Dar Al-Ittiba’, Cet. I.
- Swasono. 2005. *“Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial”*, Jakarta :Prakarsa.
- Sugiyono. 2008. *“Metode Penelitian Kualitatif dan R&D”*, Bandung: Alfabeta.
- Usman Husaini. 2000. *“Metologi Penelitian Sosial”*, Jakarta: Bumi Aksara.